

AKAR POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA

Sofi Mubarok

International Relations Department, Universitas Darussalam Gontor

Email: sofimubarok@unida.gontor.ac.id

Abstract

In the last decade, identity politics has become a central theme in political discourse in Indonesia. The peak was when the DKI Jakarta gubernatorial election was held in 2017. The emergence of the issue of the use of identity politics that carried religion and ethnicity caused various debates among intellectuals and the public. Using Michel Foucault's concepts of power and knowledge, this paper uncovers and analyzes the processes and debates behind the re-emergence of identity politics in Indonesia. Using a literature study approach, this research proves that identity politics in Indonesia existed even before the era of independence. This means that this is not something new and also that Indonesia's political experience has always been able to handle this situation.

Keywords: *Identity, Politics, Islam, Power, History, Indonesia*

Pendahuluan

Satu dasawarsa terakhir, politik identitas kembali menjadi isu yang hangat di Indonesia, dan mencapai klimaks pada Pilkada DKI Indonesia 2017 yang mempertemukan tiga calon gubernur, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Anis Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan sebagian kalangan masih khawatir, politik identitas akan kembali memanas pada pemilu tahun 2024 mendatang. Momentum Pilkada DKI Indonesia telah menunjukkan beberapa isu kampanye yang menyita tidak hanya energi masyarakat Indonesia tetapi juga Indonesia. Kembalinya petahana, seorang yang identik dengan identitas minoritas sebagai keturunan Tionghoa dan Kristen,

juga dikenal sebagai pribadi yang tegas dan bersih yang disaat yang sama juga dianggap sebagai sosok kontroversial yang mudah meledak emosinya ketika menjabat sebagai gubernur, membuat sentimen warga Muslim perkotaan di Indonesia terhadap politik identitas meningkat. Ditambah rekaman dugaan penistaan agama oleh Ahok saat kampanye di Kepulauan Seribu yang tersebar melalui media sosial yang kemudian diberi fatwa MUI sebagai penistaan agama, membuat kecaman tersebut semakin masif.

Kasus ini bermula saat Gubernur Ahok berpidato di depan masyarakat Kepulauan Seribu dengan mengutip Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 51. Cuplikan pidato yang berjudul "Menipu Al-Maidah ayat 51" menyebar secara masif di media sosial. Perdebatan muncul di publik, apakah apa yang dinyatakan adalah penistaan agama atau bukan? Dari perdebatan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian mengeluarkan fatwa yang intinya menganggap bahwa apa yang dinyatakan oleh Ahok di kepulauan seribu adalah penodaan terhadap Al-Qur'an dan penghinaan terhadap ulama ("Pendapat Dan Sikap Keagamaan MUI Terkait Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama - Majelis Ulama Indonesia" t.t.). Akibatnya, terjadi demonstrasi berseri yang mendesak pemerintah memproses Ahok secara hukum. Tak tanggung-tanggung, aksi unjuk rasa yang menamakan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI dan Aksi Bela Islam 212 diikuti oleh jutaan umat. Dilakukan beberapa kali, demo ini (terutama demo pada tanggal 2 Desember 2016) mendapat pujian banyak kalangan karena tertib dan bersih, tidak ada keributan dan aksi-aksi anarkis yang biasanya menyertai setiap demo besar. Tentu saja, fenomena ini tidak hanya menjadi konsumsi nasional tetapi juga internasional. Banyak yang kemudian khawatir akan munculnya kembali potensi konflik baru di Indonesia atas nama politik identitas.

Tulisan ini membahas politik identitas sebagai fenomena politik Indonesia modern. Ketika membahas suatu fenomena, tentu akan

berkaitan dengan aspek sejarah dan latar belakangnya. Menurut Michael Foucault, tujuan memahami sejarah masa kini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi hari ini. Atau, dalam istilah lain, bagaimana kekuasaan beroperasi. Sedangkan penyelidikan sejarah masa lalu dilakukan untuk mencari diskontinuitas dalam upaya menemukan rezim pengetahuan atau epistemik yang berkuasa pada waktu tertentu (arkeologi pengetahuan), dan bagaimana cara kerja kekuasaan tersebut saat ini (silsilah kekuasaan). Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami secara negatif dari perspektif Marxian, melainkan produktif dan reproduktif. Kekuasaan menurut Foucault tidaklah terpusat pada satu orang atau sekelompok orang tetapi bentuknya menyebar dan ada di mana-mana. Kekuasaan memiliki hubungan erat dengan pengetahuan, keduanya bahkan tak dipisahkan yang menciptakan sebuah disiplin tertentu (Parsons t.t.).

Disiplin merupakan bentuk normalisasi (menjaga) kekuasaan yang berlangsung dari suatu lembaga terhadap tubuh seorang individu. Operasi kekuasaan yang dilegitimasi oleh rezim pengetahuan tertentu sebagai normalisasi juga berlangsung dalam ruang yang lebih luas, yaitu dalam tubuh sosial (populasi). Masalah ini dibahas secara intensif oleh Foucault dalam beberapa tulisan dan kuliahnya sebagai konsep *governmentality*. Hal ini tentunya berbeda dengan pengertian kekuasaan yang lazim dipahami dalam sosiologi politik sebagai atribut dengan kajian makro (Kamahi 2017, 117). Tulisan ini mengkaji bagaimana identitas politik yang terjadi di Indonesia dipahami dengan menggunakan teori kekuasaan Foucault.

Definisi Politik Identitas

Sebelum menghadirkan politik identitas dalam sejarah politik di Indonesia, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu pengertian politik identitas itu sendiri secara bahasa dan istilah.

Secara bahasa, dalam *Cambridge Dictionary*, ada tiga makna dari Politik; pertama, politik adalah kegiatan pemerintah, anggota kelompok pembuat undang-undang, atau orang yang mencoba mempengaruhi cara suatu negara diatur; kedua, politik juga berarti tugas memegang posisi kekuasaan dalam pemerintahan.; ketiga, politik juga bisa diartikan sebagai studi tentang cara-cara di mana suatu negara diatur (“Politics | English Meaning - Cambridge Dictionary” t.t.). Sedangkan menurut Mashad, politik secara istilah dapat dijelaskan dari fungsinya yang beragam dan spesifik, yaitu; kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), alokasi anggaran (*allocation*), negara (*state*), dan kebijakan (*policy*). Dari beragam fungsi tersebut, maka politik dapat diartikan sebagai “bermacam kegiatan dalam suatu negara menyangkut penentuan tujuan-tujuan dari kelima fungsi di atas sekaligus melaksanakan fungsi tersebut” (Mashad 2021, 37).

Sedangkan identitas, secara etimologis berarti jati diri seseorang, atau sifat-sifat seseorang atau kelompok yang membedakannya dengan orang lain (“Identity | English Meaning - Cambridge Dictionary” t.t.). Menurut Hogg dan Abrams, Identitas secara istilah adalah konsep masyarakat tentang siapa dan seperti apa mereka, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan Buchari Zain, menguraikan bahwa identitas adalah tindakan yang membedakan individu atau kelompok dengan yang lain dan dilakukan secara terus menerus hingga muncul opini tertentu terkait keberadaannya. Manuel Castels, menyebutkan bahwa identitas adalah sumber makna diri yang muncul dan diberikan oleh seorang individu atau kelompok terhadap diri mereka melalui proses individuasi (ketentuan untuk menjadi berbeda dari yang lain) (D. Lestari 2019, 14).

Bagi Mashad, Identitas adalah sumber makna dan pengalaman seseorang. Setiap orang memiliki identitas yang melekat padanya yang dengan itu membedakan antara dirinya dengan orang lain (nama,

bahasa, budaya). Individu, maupun aktor kolektif, biasanya memiliki lebih dari satu identitas. Contohnya sebagai seorang dengan identitas laki-laki, ia disaat yang sama juga seorang Sunda, Muslim, atau lebih spesifik Tradisionalis Muslim misalnya untuk membedakan dengan muslim lainnya, dan sebagai warga negara Indonesia (Mashad 2021, 29). Ia kemudian menjelaskan dominasi agama atas sederet model identitas yang lain. Menurutnya, dalam konstruksi identitas, agama memiliki peran dominan dan bahkan bisa dikatakan paling menentukan dibandingkan dengan ide-ide yang lain, seperti jenis kelamin, suku, bangsa, afiliasi politik dan lain-lain. Dominasi agama dalam mengkonstruksi identitas seseorang dipengaruhi oleh sifat agama yang sakral dan transdimensional. Artinya, ia tidak hanya berurusan dengan hal-hal duniawi, sementara, namun juga merupakan penentu nasib di akhirat atau alam setelah kematian kelak.

Sedangkan politik identitas, atau kadang-kadang disebut sebagai identitarianisme adalah suatu paham politik di mana sekelompok orang yang memiliki identitas ras, agama, etnis, sosial, atau budaya yang sama cenderung untuk mempromosikan kepentingan atau urusan mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan atau kekhawatiran dari kelompok-kelompok politik lain yang lebih besar ("Identity Politics" 2020). Agnes Heller menyatakan bahwa politik identitas sebagai politik yang fokus utamanya pada pembedaan yang orientasinya adalah kebebasan, toleransi dan kebebasan bermain (*free play*) (D. Lestari 2019, 14). Cresida Heyes, menyatakan bahwa Politik identitas adalah usaha untuk menunjukkan berbagai aktifitas politik berdasarkan Indonesiaadilan yang terjadi pada satu kelompok sosial (Y. S. Lestari 2018, 21). Ide ini dikonfirmasi oleh Syafi'i Ma'arif yang menyatakan bahwa politik identitas terkait erat dengan kepentingan anggota-anggota kelompok marjinal, yang diperas dan tersingkir oleh kekuasaan negara (Maarif dkk. 2010, 4).

Akar Politik Identitas di Indonesia

Ilmuan sosial sejatinya baru mulail tertarik isu politik identitas sekitar dasawarsa 1970an di Amerika Serikat, ketika muncul problematika gender, feminisme, ras, etnisitas dan kelompok yang teralienasi lainnya. Yang pertama-tama menjelaskan hakikat politik identitas adalah L.A. Kauffman, yang meneliti asal muasal dari gerakan mahasiswa anti kekerasan SNCC (*The Student Non Violent Coordinating Committee*) pada awal dekade 1960an yang menciptakan istilah yang masih tidak jelas. Di Indonesia, aktualisasi politik identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal (Maarif dkk. 2010, 3–4).

Dalam perjalanan sejarah, Indonesia lahir dan tumbuh sebagai negara dengan perbedaan identitas masyarakat, ras, suku, agama, dan budayanya. Perdebatan itu dijembatani oleh jargon Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Perbedaan ini, sepanjang sejarah negara ini, seringkali memunculkan fenomena politik identitas. Artinya, jika berbicara tentang politik identitas, seperti berbicara tentang realitas abadi politik Indonesia.

Sejak tahun 1930-an, telah terjadi dua kutub pemikiran di kalangan pejuang kemerdekaan Indonesia, yaitu kelompok beridentitas sekuler dan kelompok Islam. Dalam mengomentari realitas Republik Turki, kelompok pertama diwakili oleh Sukarno - yang kemudian menjadi presiden pertama Indonesia- menyebut Turki sebagai negara modern yang sukses karena melepaskan diri dari bayang-bayang Islam dalam kehidupan bernegara. Sedangkan kelompok kedua yang digawangi oleh M. Natsir -yang kemudian menjadi ketua umum Masyumi, partai Islam terbesar era Orde Lama-, dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia yang diidamkan di masa depan tidak boleh lepas dari Islam (Noer 2003, 5).

Kedua identitas politik ini menjadi poros penting bagi peta politik Indonesia hingga saat ini. Namun perdebatan yang terjadi tidak selalu berbentuk konflik yang tak berujung, terkadang dan yang sering terjadi adalah sintesis antara keduanya. Kompromi dan mufakat antara dua ideologi. Atau konsensus. Seperti ketika terjadi perubahan sila pertama Pancasila hasil piagam Indonesia, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang menghapus tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, yang diajukan Hatta dengan alasan jika kalimat itu tidak dihapus orang-orang Kristen di Indonesia Timur akan melepaskan diri dari Republik Indonesia. Kaum Muslimin, rela menerima keputusan itu, meski rasa kecewa tak bisa disembunyikan dari wajah mereka (Noer 2003, 5).

Kemudian, suasana ini kembali pada saat sidang Konstituante yang demokratis namun tegang. Kelompok Islam merasa mendapat kesempatan untuk mendebat kembali tentang pilihan dasar negara dan atau minimal kembalinya tujuh kata dalam sila pertama pancasila dalam suasana yang demokratis. Pada perdebatan kali ini ada tiga alternatif dasar dari sila negara Indonesia yang diusulkan, Pancasila, Islam, dan ekonomi kerakyatan. Prinsip Pancasila didukung oleh kaum nasionalis, sosialis, dan komunis. Prinsip negara Islam didukung oleh kalangan Islam yang terdiri dari Masyumi, Nahdhatul Ulama (NU), Partai Persatuan Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Persatuan Prinsip Islam (PPTI). Sedangkan sosio-ekonomi dikemukakan oleh kaum kiri, termasuk partai-partai buruh (Noer 2003, 3).

Musyawarah tidak mencapai mufakat. Meski akhirnya bermufakat juga untuk mengadakan pemungutan suara. Voting pertama terkait ide pengembalian tujuh kata dalam piagam Indonesia. Hasilnya 201 setuju dan 265 lainnya tidak setuju. Tidak tercapai 2/3 suara. Kedua, terkait keinginan pemerintah untuk kembali pada UUD 1945 tanpa

perubahan, yang hasilnya juga tidak mencapai batas minimal kemenangan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Pada ujungnya, pemungutan suara juga tidak menghasilkan keputusan. Terjadilah deadlock. Kemudian atas usul Panglima Angkatan Darat Jenderal Nasution dan ketua umum Partai Nasional Indonesia (PNI) Suwirjo, presiden Sukarno membubarkan Konstituante dan menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Lalu, untuk menyikapi kondisi ini diterbitkan dekrit presiden 5 Juli 1959 atas usulan dari militer. Menurut Adnan Buyung Nasution, kondisi deadlock yang digambarkan sebenarnya tidaklah tepat. Kubu Masyumi sebenarnya telah menerima negara Pancasila sebagai kompromi politik. Tapi sepertinya, proses ini digagalkan oleh militer yang tak sabar untuk kembali ke UUD 1945 yang bisa menjamin hak politik dan kepentingan mereka (Gramedia 2011, 57). Maka, kompromi kali ini tercipta melalui jalur kekuasaan dan paksaan. Tapi tetap terjadi kompromi meski dengan rasa kecewa yang tinggi, terutama dari kelompok Islam.

Pada waktu yang bersamaan, pada tahun 1956 Sukarno mengkampanyekan ide penyatuan tri ideologi yang eksis masa itu yaitu NASAKOM, yang merupakan kependekan dari Nasionalis, Religius, Komunis (Ismail M.A. 2017, 35). Sukarno, dengan mengusung gagasan ini, seolah ingin meruntuhkan polemik berbasis politik identitas di kancah perpolitikan nasional. Selain itu juga dimotivasi oleh realitas politik kala itu, salah satunya adalah kebutuhan Sukarno kepada Partai Komunis Indonesia terkait isu konfrontasi dengan Malaysia, di sisi yang lain adanya penentangan kuat dari kelompok Islam atas ideologi PKI yang gerakan-gerakannya semakin sewenang-wenang di masyarakat. Untuk menjembatani perdebatan ini, maka NASAKOM dipilih sebagai gagasan penengah. Sebagai ejawantah dari ideologi gotong royong.

Ide ini ditolak oleh wakilnya, Hatta yang akhirnya mengundurkan diri karena kecewa Sukarno bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang tidak dia setujui. Juga bisa ditebak, bahwa ide ini ditolak oleh umat Islam dan menyebabkan kekecewaan yang mendalam pada diri mereka. Belum genap sepuluh tahun, ide ini runtuh pada tahun 1965, dengan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, yang menjadi bukti apa yang dikhawatirkan Hatta akhirnya terjadi. PKI dengan tempatnya dalam struktur politik nasional menjadi lepas kendali.

Orde Baru dan Meredupnya Politik Identitas

Di era Presiden Suharto tahun 1969-98, politik identitas diberangus habis dengan menggunakan berbagai wacana. PKI dibubarkan karena telah melakukan pemberontakan, begitu pula kelompok-kelompok Islam juga tidak memiliki celah untuk mempersoalkan kembali dasar negara. Di era ini, semua partai dan ormas harus berdasarkan Pancasila sebagai asas tunggal. Ide ini mulai disuarakan pada tahun 1982 dan kemudian secara resmi dituangkan dalam UU nomor 3 tahun 1985 (Ismail M.A. 2017, 250). Ada kekuatan yang memaksa atau normalisasi perilaku yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru yang cukup berhasil menghambat segala potensi munculnya isu-isu yang menggunakan politik identitas. Meskipun, konflik Suharto dengan kelompok-kelompok Islam tetap terlihat pada beberapa kebijakannya, namun selalu bisa diredam dan dinormalisasi.

Setelah muncul sebagai kekuatan utama, militer di bawah Suharto mulai konsolidasi terkait akan ke mana negara Indonesia dibawa. Dengan kondisi ekonomi yang porak-poranda, kondisi sosiologis paska konflik melawan PKI, tentu harus ada beberapa strategi yang ditempuh. Tidak hanya itu, Suharto dan militer juga mencari cara untuk mengamankan kekuasaannya di masa-masa kritis tersebut. Oleh karena itu, menurut Orde Baru pada awal pemerintahannya sampai

tahun 1980an, Islam dianggap sebagai kekuatan yang bisa sewaktu-waktu menjadi ancaman bagi mereka. Setidaknya ada tiga perspektif Orde Baru tentang potensi Islam tersebut:

1. Islam adalah satu-satunya ideologi besar yang tersisa di Indonesia setelah Komunisme dibubarkan.
2. Pemerintah Orde Baru melihat bahwa kelompok-kelompok Islam masih berpotensi untuk menuntut kembali pendirian negara Islam atau setidaknya menerapkan implementasi hukum syariah di Indonesia.
3. Di era ini, pemerintah mengklaim bahwa pembangunan ekonomi domestik dan menciptakan stabilitas politik adalah prioritas utama, bukan berdebat tentang ideologi lagi (Perwita 1999, 9).

Maka, setelah kemenangan signifikan Sekber Golkar pada pemilu 1971, pemerintah Orde Baru dengan alasan stabilitas ekonomi dan politik mendorong kebijakan untuk mengurangi jumlah partai politik. Melalui sidang umum MPR 1973, partai-partai politik yang ada mengalami penyederhanaan dari yang sebelumnya 9 partai menjadi hanya tiga saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golkar. PPP merupakan fusi dari Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam PERTI (Pergerakan Tarbiyah Islamiyah), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); PDI adalah gabungan dari PNI, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik; dan terakhir Golongan Karya (Golkar) sebagai nama baru pengganti Sekber Golkar. Di bawah Suharto, Golkar terus menggambarkan dirinya sebagai entitas non-ideologis, tidak pilih kasih atau agenda politik tertentu. Partai ini dijanjikan untuk fokus pada “pembangunan ekonomi” dan “stabilitas” daripada tujuan ideologis tertentu (Elson 2001, 187).

Reformasi dan Kembalinya Politik Identitas

Selama tiga puluh dua tahun, kondisi ini terus berlanjut. Isu-isu politik identitas yang hampir tidak pernah mencuat ke permukaan. Ideologi politik diabaikan, dan kemudian digantikan dengan pragmatisme politik pembangunan ala Suharto. Namun tentu saja, kelompok Islam dan Nasionalis masih menyimpan gagasan kebenaran pada lubuk hati mereka. Maka pada tahun 1998, ketika rezim Suharto jatuh, puing-puing politik identitas mulai menemukan momentumnya kembali. Ditambah proses demokratisasi dalam suasana kebhinekaan yang sedang berjalan sebagai pengganti pemerintahan otoriter merupakan lahan subur bagi tumbuhnya politik identitas. Ada beberapa alasan mengapa politik identitas muncul begitu masif, salah satunya diungkapkan oleh Sonia Kruks bahwa, ketiadaan rekognisi atas eksistensi identitas tertentu merupakan penyebab utama tumbuhnya politik identitas. Tujuannya bukan untuk “diakui”, namun lebih kepada tuntutan rasa hormat kepada diri mereka sendiri sebagai sesuatu yang berbeda (Kruks 2001, 85).

Bahkan Syafi'i Ma'arif menegaskan bahwa kebangkitan politik identitas terkait dengan kepentingan anggota-anggota kelompok marjinal, yang diperas dan tersingkir dari kekuasaan negara. Artinya, politik identitas tidaklah didorong oleh identitas dan perbedaan, tapi lebih disebabkan oleh argumen keadilan sosial (Maarif dkk. 2010, 4–5). Inilah yang terjadi dan dirasakan oleh kelompok Islam selama tiga dekade kepemimpinan Suharto, meskipun di beberapa tahun terakhirnya hubungan Suharto dengan Islam mulai mendekat. Dalam terminologi Foucault, telah terjadi pergeseran pengetahuan otoritatif, dari pengabaian politik identitas di era Orde Baru ke munculnya keyakinan dan harapan akan politik identitas bagi Indonesia di masa depan. Maka, era ini dimulai dengan munculnya partai-partai politik yang kental dengan nuansa politik identitas. Partai-partai Islam bermunculan, partai dengan identitas agama lain juga mencoba

peruntungannya. Bahkan, partai-partai dengan ideologi kiri yang selama ini teralienasi dari politik Indonesia sejak tahun 1965 juga bangkit.

Akibatnya, nuansa politik identitas mulai terlihat lagi pada pemilihan presiden 1999. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)—partai yang memisahkan diri dari PDI era Orde Baru—yang memenangkan pemilu dengan 33% suara yang mengusulkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden, akhirnya harus mengakui kekalahannya setelah partai-partai Islam plus Partai Golkar bersatu di bawah payung koalisi Poros Tengah yang mengusung Gus Dur sebagai calonnya (Wanandi 2002, 109). Peristiwa ini mengingatkan pada konflik yang terjadi pada masa Orde Lama antara kelompok Islam dan nasionalis. Situasi ini membuat pendukung Megawati marah, Gus Dur tidak tinggal diam. Sebagai kompromi politik, dia mengupayakan agar Megawati bisa menemaninya sebagai wakil presiden. Mufakat kembali terjadi sebagai jalan keluar dari memuncaknya politik identitas. Meskipun akhirnya Wahid dijatuhkan oleh kelompok yang sama dan digantikan oleh Megawati (Sukma 2004, 6). Konsensus politik tetap dijaga oleh Megawati yang kemudian mengangkat Hamzah Haz dari partai Islam PPP sebagai wakil presiden.

Pada tahun 2004, politik identitas mulai sedikit memudar dari kancah politik nasional ketika pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) yang didukung oleh Partai Demokrat berhasil memenangkan pemilihan presiden demokratis pertama setelah reformasi 1998. Secara ideologis, Partai Demokrat cenderung pragmatis, bahkan mengklaim partainya sebagai nasionalis-religius. Dengan demikian, di kalangan kelompok nasionalis dan Islam, partai Demokrat tidak terlalu mengganggu secara ideologis, sebagaimana Golkar di era Suharto. Apalagi, koalisi yang dibangun juga diikuti oleh seluruh partai kecuali PDIP pada periode pertama 2004-2009, dan

pada periode kedua 2009-2014 oposisi bertambah dengan keluarnya Gerindra dan Hanura dari koalisi. Oleh karena itu, perdebatan di era ini tidak mengangkat isu ideologis, hanya perdebatan isu kebijakan di bidang ekonomi, politik dan keamanan saja. Meskipun konflik domestik di era ini juga mencapai puncaknya, namun politik identitas bisa diredam sedemikian rupa. Kondisi ini mungkin juga terkait dengan background SBY yang militer, sebagaimana Suharto, yang secara naluri dan struktural mampu mengidentifikasi dan kemudian meredam satu kondisi di masyarakat dengan berbasis jaringan informasi dan data intelejen yang ia miliki.

Puncak Fenomena Politik Identitas di Indonesia

Sepuluh tahun kemudian, politik identitas kembali muncul ke permukaan pada pemilihan presiden 2014. Meskipun embrionya sudah dimulai sejak Pilkada DKI 2012 yang disebabkan oleh usaha pemaksaan pencalonan kontroversial seorang yang dikenal dari kelompok minoritas menjadi calon wakil gubernur. Maka, pada 2014, sesungguhnya persoalannya tidak hanya majunya Jokowi sebagai calon presiden, namun lebih kepada potensi munculnya gubernur non-muslim dan keturunan Tionghoa, akibat kursi yang ditinggalkan oleh Jokowi jika terpilih menjadi presiden. Karena secara historis, kelompok-kelompok Islam memiliki kenangan buruk terhadap hal-hal berbau Tiongkok sejak pemberontakan PKI tahun 1965. Bahkan jauh sebelum itu, konflik antara kelompok Islam dan PKI tidak pernah menemukan titik temu. Hingga bahkan di era Orde Baru pada tahun 1990, saat Suharto saja akhirnya bersedia melakukan normalisasi hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok, kecaman masih datang bertubi-tubi dari kelompok Islam.

Juga saat terjadi kerusuhan tahun 1998, sentimen anti Tiongkok begitu terasa dan terlihat dengan jelas, terutama di wilayah urban termasuk di Ibu Kota. Meskipun sentimen ini telah dipulihkan sejak era Gus Dur, seperti pengakuan Konghucu sebagai agama ke enam

(Mustajab 2015, 172), dan juga menjadikan hari-hari besar Imlek sebagai hari libur nasional (Mustajab 2015, 192), tapi fakta-fakta di atas menjelaskan bahwa memaksakan calon gubernur DKI dengan background minoritas jelas terlalu riskan dan seperti memancing keributan. Memunculkan calon dengan identitas seperti itu secara definitif merupakan praktik politik identitas juga.

Apalagi secara geneologis, selain sebagai Ibu Kota negara yang menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia, DKI Jakarta telah membuktikan dirinya sebagai salah satu basis Islam sejak lama. Maka, kemenangan Anis Baswedan pada tahun 2017 di Pilkada DKI Jakarta, yang disokong oleh kelompok Islam, tidaklah mengejutkan. Pada tahun 1977 misalnya, PPP telah memenangkan pertarungan suara pemilu legislatif mengalahkan Golkar, yang pada saat itu sedang berkuasa-berkuasanya (Ismail M.A. 2017, 181). Sempat meredup dengan berbagai tekanan di sisa periode Orde Baru, kemudian representasi Islam di Ibu Kota kembali melalui suara PKS. Pada pemilu legislatif tahun 2004 dengan suara mayoritas 23 persen dan pada Pilkada DKI 2007 yang meskipun kalah, mendapatkan suara 44% melawan koalisi seluruh partai dengan bertarung sendirian (Hidayat 2016, 8).

Akibatnya, sejak tahun 2014, perdebatan ideologis terjadi antara kelompok Islam dan nasionalis. Bedanya adalah bahwa kelompok Islam tidak lagi satu suara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PPP yang mewakili kelompok Muslim tradisional memilih untuk mendekat dengan PDI-P yang mencalonkan Indonesia Widodo yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Indonesia. Sementara partai Islam lainnya seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Tren ini mengingatkan pada konstalasi partai politik pada pemilu 1955, saat NU yang tiga tahun sebelumnya memutuskan untuk berpisah dengan Masyumi.

Berbeda dari kondisi tahun 2014 yang lebih pada persoalan pemahaman politik Islam secara praktis dan pragmatis, pada tahun 1952 persoalannya lebih pada kekecewaan mereka terhadap tokoh tertentu.

Kodisi ini kemudian mencapai puncaknya pada pemilihan Gubernur DKI Indonesia tahun 2017 yang terjadi perang politik identitas yang begitu masif antara dua kubu. Bahkan berlanjut hingga pemilihan presiden tahun 2019 yang seolah memecah masyarakat menjadi hanya dua kelompok saja. Hingga, terjadi rekonsiliasi dan kompromi politik di antara dua pihak, bahkan Prabowo dan kemudian disusul Sandiaga Uno yang merupakan rival Jokowi-Ma'ruf di pemilu 2019, bersedia menjadi bagian dari kabinet Jokowi-Ma'ruf. Realitas ini, meskipun masih menyisakan kekecewaan pada beberapa kelompok Islam yang sebelumnya menjadi pendukung Prabowo, namun tradisi kompromi politik dalam menyelesaikan konflik tetaplah terjadi.

Blunder politik ini tentu menjadi pelajaran penting dimasa yang akan datang. Memaksakan calon minoritas dalam satu komunitas dengan fanatisme yang sangat besar tentu menjadi pertarungan politik yang sangat beresiko. Sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat, bagaimana euforia munculnya presiden minoritas kulit hitam Barack Obama, malah berdampak pada tumbuhnya gerakan *white supremacy* yang memuncak dengan terpilihnya Donald Trump dengan segala kontroversi dan konflik yang muncul di era kepemimpinannya. Bahkan, gerakan tersebut semakin menunjukkan eksistensinya hingga kini.

Dalam sejarah, pertarungan politik seperti ini telah dihindari oleh beberapa pemimpin. Misalnya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah pada dinasti Bani Umayyah, yang menghindari untuk memilih Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar (bukan dari Bani Umayyah), dan tetap menyerahkan kekhilafahan setelahnya kepada Yazid bin Abdul Malik yang memiliki kualitas lebih rendah namun memiliki trah

Bani Umayyah. Ini karena ia sadar bahwa memilih seseorang di luar fanatisme mayoritas akan mengakibatkan perpecahan (bin Khaldun 2011, 366). Bahkan Ibnu Khaldun menganggap bahwa fenomena tersebut adalah fenomena yang alamiah. Tidak ada hubungannya dengan identitas atau ideologi tertentu, juga tidak ada kaitannya dengan sistem politik tertentu. Jika seorang minoritas dipaksakan menjadi pemimpin satu kelompok mayoritas yang memiliki fanatisme yang kuat, maka penolakan dan konflik akan muncul.

Di tambah, jika fanatisme ini dibalut dengan agama, maka ia akan menjadi lebih besar lagi (bin Khaldun 2011, 264). Hal ini diamini oleh Mashad bahwa agama dalam konstruksi identitas memiliki peran dominan dan paling menentukan dibanding dengan identitas-identitas yang lain (Mashad 2021, 30). Bahkan menurut survei indikator pada Januari 2016 di Indonesia menemukan bahwa etnis dan agama adalah faktor yang dipertimbangkan dalam memilih calon pemimpin, lebih lanjut “faktor kesamaan agama” lebih menjadi pertimbangan dalam memilih calon daripada faktor etnisitas (Muhtadi 2018, 69).

Dari berbagai pemaparan di atas, politik identitas di Indonesia sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dan tidak bisa diselesaikan. Fakta-fakta sejarah membuktikan bahwa, konflik atas nama politik identitas selalu selesai melalui dua cara, yaitu kompromi politik pada masa demokrasi dan melalui jalur kekuasaan di era otoriter yaitu pada masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru. Dari realitas sejarah politik di atas, tentu potensi munculnya politik identitas di Indonesia pada masa mendatang masih sangat besar. Maka, dialog dan musyawarah seharusnya selalu dijadikan tradisi politik rutin dalam pembahasan masalah negara, tidak hanya sekedar jargon yang tertempel pada Pancasila. Juga, tidak perlu lagi ada pemaksaan ide melalui kekuasaan, yang telah terbukti dalam sejarah, bisa mengganggu kedamaian politik nasional. Dalam hal ini, politik identitas di Indonesia, melalui jalur panjang wacana dialektika, telah mengakibatkan pergeseran

pengetahuan otoritatif dari waktu ke waktu. Kekuasaan dan kompromi menjadi jalan utama terjadinya sintesa ide dan gagasan.

Daftar Pustaka

- Elson, Miriam. 2001. "Silence, Its Use and Abuse: A View from Self Psychology." *Clinical Social Work Journal* 29 (4): 351–60.
- Gramedia, Kepustakaan Populer. 2011. *Natsir: Politik Santun Di Antara Dua Rezim, Seri Buku Tempo*. KPG & Majalah Tempo.
- Hidayat, Syahrul. 2016. "An Islamic Party in Urban Local Politics: The PKS Candidacy at the 2012 Jakarta gubernatorial Election." *Jurnal Politik* 2 (1): 5–40.
- "Identity | English Meaning - Cambridge Dictionary." t.t. Diakses 9 November 2022.
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/identity>.
- "Identity Politics." 2020. 13 Maret 2020.
- Ismail M.A., Prof. Dr. H. Faisal. 2017. *Panorama Sejarah Islam Dan Politik Di Indonesia: Sebuah Studi Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSOD.
- Kamahi, Umar. 2017. "Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik." *Jurnal Al-Khitabah* 3 (1): 117–33.
- Khaldun, Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin. 2011. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Edisi Indonesia. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kruks, Sonia. 2001. *Retrieving Experience: Subjectivity and Recognition in Feminist Politics*. London: Cornell University Press.
- Lestari, Dina. 2019. "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Mandala* 4 (4): 12–16.

- Lestari, Yeni Sri. 2018. "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama." *Journal of Politics and Policy* 1 (1): 19–29.
- Maarif, Ahmad Syafii, Martin Lukito Sinaga, Siti Musdah Mulia, Eric Hiariej, Asfinawati, Budiman Sudjatmiko, Yayah Khisbiyah, dan Tonny D. Pariela. 2010. "Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia." Dalam *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*, disunting oleh Samsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, 3–31. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Mashad, Dhurorudin. 2021. *Politik Kaum Santri Dan Abangan: Refleksi Historis Perseteruan NU-PKI*. Perpustakaan Al-Kautsar.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2018. "Politik Identitas Dan Mitos Pemilih Rasional." *Jurnal Maarif* 13 (2): 68–86.
- Mustajab, Ali. 2015. "Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa Di Indonesia." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 5 (1): 153–92.
- Noer, Deliar. 2003. *Islam & Politik*. Jakarta: Yayasan Risalah.
- Parsons, William. t.t. "Michel Foucault's Relationship between Power and Knowledge." Diakses 9 November 2022. https://www.academia.edu/33175616/Michel_Foucault_s_relationship_between_power_and_knowledge.
- "Pendapat Dan Sikap Keagamaan MUI Terkait Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama - Majelis Ulama Indonesia." t.t. Diakses 8 November 2022. <https://mui.or.id/berita/10590/pendapat-dan-sikap-keagamaan-mui-terkait-pernyataan-basuki-tjahaja-purnama/>.
- Perwita, Anak Agung Banyu. 1999. "Islam" Symbolic Politics", Democratization and Indonesian Foreign Policy." *Asiaweek*.

Sofi Mubarak

“Politics | English Meaning - Cambridge Dictionary.” t.t. Diakses 9
November 2022.
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/politics>.

Sukma, Rizal. 2004. *Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and the Dilemma of Dual Identity*. Routledge.

Wanandi, Jusuf. 2002. “Islam in Indonesia: Its History, Development and Future Challenges.” *Asia Pacific Review* 9 (2): 104–12.